

INDOTEXTILES

The Indonesian Textiles, Apparel & Fashion Community Reference



Perlu Langkah Cepat Pulihkan Industri TPT Nasional

Dalam 2 tahun terakhir industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional tengah berada dalam tekanan besar yang berimbas pada 60-an perusahaan gulung tikar dan 250 ribu tenaga kerja di PHK. Harapan perbaikan bertumpu pada pemerintah baru, ditengah perbaikan kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Meski publik melihat bahwa sedang ada perbaikan besar-besaran ditubuh birokrasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, kalangan tekstil tengah menunggu dan berharap ada langkah signifikan yang segera diambil Presiden Prabowo untuk memperbaiki sektor manufaktur padat karya yang masih menjadi andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan domestik hingga penghasil devisa ekspor.

Ditengah hiruk pikuk perang dagang dan kondisi geo politik yang menyebabkan tingginya hambatan ekspor, maka pasar domestik menjad tumpuan utama sektor TPT

nasional. Hanya saja permasalahan banjirnya barang impor khususnya importasi ilegal masih menjadi permasalahan klasik yang semakin mengganas.

Untuk mengatasi masalah ini maka kalangan tekstil sangat memerlukan intervensi Presiden Prabowo mengingat banyak pihak terlibat dan berkepentingan terhadap praktik ilegal ini. Untuk itu sebagai pemain disektor ini, mari kita bersama mendorong perbaikan dan tetap menyuarakannya agar pemerintah segera turun tangan menjalankan agenda pemulihan industri TPT Nasional.

Salam,
Tim Redaksi

ISI EDISI ke-85

Berita Utama

- Indonesia Pimpin AFTEX, Pengusaha Tekstil Optimis Industri TPT Bangkit di 2025

Berita Terbaru

- Gangguan Ormas terhadap Industri Tekstil Kian Meresahkan
- Tantangan Industri Tekstil Nasional: Kode Merah yang Harus Segera Ditangani
- CKP Textile Tetap Optimis di Tengah Gempuran Tekstil Impor
- Pemerintah Perkuat Kebijakan untuk Redam PHK di Industri Tekstil
- Indonesia Tampilkan Kain Berkualitas di Intertextile Shanghai 2025
- Pesanan AS Meningkat, Ekspor Tekstil Indonesia Tembus US\$1,02 Miliar
- Tantangan Batik Cirebon di Tengah Gempuran Produk Tekstil Murah
- DPR Dorong Pembentukan Satgas Padat Karya untuk Selamatkan Industri Tekstil
- Strategi Pemerintah Genjot Industri Tekstil Melalui EU-CEPA dan Revitalisasi Mesin

- Yogyakarta Siap Menjadi Tuan Rumah Konferensi Tekstil dan Apparel Internasional 2025
- Investasi di Industri Tekstil Indonesia: Antara Harapan dan Realita
- Birokrasi Berbelit Jadi Penghambat Relokasi Pabrik Tekstil ke Indonesia
- Dukungan Pemerintah untuk UMKM Tekstil Lewat KUR Rp 20 Triliun
- Krisis Daya Beli dan Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025

BERITA UTAMA

Indonesia Pimpin AFTEX, Pengusaha Tekstil Optimis Industri TPT Bangkit di 2025



Indonesia resmi mengambil alih kepemimpinan ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX) dari Kamboja dalam acara serah terima di Phnom Penh pada 28 Februari 2025. Selama dua tahun ke depan, Indonesia akan memimpin organisasi yang beranggotakan negara-negara ASEAN seperti Kamboja, Singapura, Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia.

Meski industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional masih menghadapi tantangan akibat lonjakan impor produk jadi dan lemahnya regulasi perlindungan industri padat karya, para pengusaha tetap optimis terhadap pertumbuhan sektor ini. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa,

yang kini menjabat sebagai Presiden AFTEX, menilai bahwa tantangan serupa juga dialami negara-negara lain di kawasan. Dengan strategi dan kolaborasi yang tepat, ia yakin industri TPT Indonesia akan kembali bangkit.

Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana, menekankan bahwa kepemimpinan Indonesia di AFTEX harus menjadi momentum bagi pemerintah, dunia usaha, dan pekerja untuk bersinergi dalam memperbaiki ekosistem industri. Menurutnya, negara-negara produsen tekstil lain terus menyesuaikan regulasi agar tetap kompetitif secara global, dan Indonesia harus melakukan hal yang sama untuk menjaga industri padat karya ini tetap menyerap tenaga kerja. Ia juga menyoroti potensi Indonesia menjadi pusat industri tekstil dan fashion dunia jika dapat meningkatkan produktivitas dan memperbaiki citra industri.

Sebagai federasi yang mendorong kerja sama antarnegara ASEAN, AFTEX memiliki peran strategis dalam pengembangan industri tekstil dan garmen. Jemmy Kartiwa menegaskan pentingnya kolaborasi global untuk mendorong pertumbuhan sektor ini, mengingat tidak ada negara yang dapat berkembang sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain.

Di bawah kepemimpinan Indonesia, AFTEX akan menyelenggarakan pertemuan tahunan bagi negara-negara produsen tekstil dan garmen ASEAN mulai tahun 2025. Forum ini akan menjadi ajang penting bagi negara anggota untuk merumuskan strategi dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, sekaligus memperkuat posisi industri TPT di kancah internasional.

**The Introduction ;
A history, journey and development
of the Indonesia
textile and garment industry**

INDOTEXTILES TV

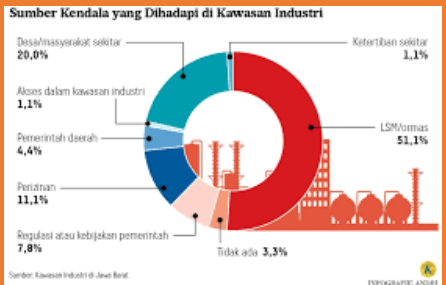
The Indonesia Textiles, Apparel & Fashion Community Reference



BERITA TERBARU

Gangguan Ormas terhadap Industri Tekstil Kian Meresahkan

Para pelaku usaha di Indonesia meminta pemerintah mengambil langkah tegas



dalam menertibkan organisasi masyarakat (ormas) yang kerap mengganggu dunia usaha, termasuk industri tekstil. Saat ini, industri tekstil dalam negeri sudah menghadapi tantangan berat akibat derasnya barang impor dan menurunnya daya saing, sehingga gangguan tambahan dari ormas semakin memperburuk kondisi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil mengungkapkan bahwa berbagai tindakan ormas telah meresahkan dunia usaha dan berpotensi merugikan industri. Salah satu bentuk gangguan yang sering terjadi adalah demonstrasi di depan pabrik atau permintaan audiensi yang menghambat kelancaran produksi. Kebebasan berkumpul dan berpendapat memang dijamin di Indonesia, tetapi aktivitas ormas yang berlebihan dapat mengganggu industri yang harus beroperasi selama 24 jam.

Selain itu, di beberapa daerah tertentu, kelompok ormas bahkan melakukan pemalakan terhadap angkutan barang industri. Di Jawa Barat, misalnya, satu truk angkutan industri kerap dimintai uang keamanan oleh oknum ormas, atau mereka dengan sengaja merusak jalan lalu meminta bayaran sebagai kompensasi perbaikan. Tindakan seperti ini jelas merugikan dunia usaha dan meningkatkan biaya operasional bagi para pengusaha tekstil.

Gangguan lain yang sering muncul adalah dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Namun, Farhan menegaskan bahwa industri tekstil tidak menerapkan praktik pungli dalam perekrutan karyawan. Pabrik lebih mengutamakan tenaga kerja terampil, sehingga mereka justru akan rugi jika mempekerjakan tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan akibat praktik pungli. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada pihak yang mengaku bisa meloloskan seseorang ke dalam perusahaan dengan membayar sejumlah uang, karena proses seleksi tenaga kerja dilakukan secara ketat.

Para pengusaha tekstil mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret dalam menertibkan ormas-ormas yang semakin merugikan dunia usaha. Jika dibiarkan, keberadaan mereka bisa semakin

mengganggu jalannya bisnis dan memperburuk kondisi industri yang sudah berada dalam tekanan akibat serbuan barang impor. Langkah tegas dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri tekstil dalam negeri.

Tantangan Industri Tekstil Nasional: Kode Merah yang Harus Segera Ditangani



Industri tekstil dan garmen nasional tengah menghadapi tantangan besar yang berpotensi mengancam kelangsungan sektor ini. Dalam beberapa waktu terakhir, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan penutupan pabrik-pabrik besar menjadi realitas yang tidak bisa diabaikan. Jika tren ini terus berlanjut tanpa intervensi serius, bukan hanya industri strategis yang terancam hilang, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang besar akan dirasakan oleh masyarakat.

Kasus PT Sritex hanyalah salah satu dari banyak pabrik yang mengalami tekanan berat. Pabrik piano Yamaha dan puluhan pabrik tekstil lainnya dengan ribuan tenaga kerja juga mengalami nasib serupa. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSYFI) mengonfirmasi bahwa sejak Januari 2023 hingga Desember 2024, sebanyak 61 pabrik tekstil telah tutup dan merumahkan ribuan pekerja. Bahkan pada Januari 2025, laporan baru menyebutkan bahwa PT Mbangun Praja Industri juga mengalami nasib serupa.

Ketua Umum APSYFI, Redma Gita Wirawasta, menegaskan bahwa penyebab utama dari situasi ini adalah derasnya impor produk tekstil yang tidak terkendali, baik yang masuk secara legal maupun ilegal. Akibatnya, pabrik-pabrik besar yang dulu menjadi tulang punggung ekspor tekstil kini kesulitan bersaing, bahkan terpaksa berhenti beroperasi.

Industri tekstil memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Sayangnya, banyak pihak masih menganggap sektor ini sudah tidak relevan di tengah perkembangan otomasi dan industri berbasis teknologi. Padahal, di berbagai negara, industri tekstil tetap dipertahankan sebagai sektor strategis dengan kebijakan protektif dan insentif yang meningkatkan daya saing.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah untuk menyelamatkan industri padat karya yang sedang mengalami tekanan besar. Kebijakan impor harus lebih selektif, mengingat banjirnya produk impor murah telah melemahkan daya saing industri lokal. Sementara itu, pelaku industri dalam negeri menghadapi berbagai keterbatasan seperti biaya produksi tinggi, ketergantungan pada bahan baku impor, serta regulasi yang kurang mendukung.

Daya beli masyarakat yang melemah semakin memperburuk kondisi ini. Konsumen cenderung memilih produk dengan harga lebih terjangkau tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap industri dalam negeri. Tanpa perlindungan yang memadai, industri tekstil nasional terancam lumpuh dalam beberapa tahun ke depan.

Negara-negara lain telah mengambil langkah tegas untuk melindungi sektor tekstil

mereka. China memberikan subsidi besar kepada industri tekstil agar tetap kompetitif di pasar global, sementara Vietnam dan Bangladesh menawarkan insentif pajak serta membangun ekosistem industri yang lebih efisien. Indonesia perlu menerapkan kebijakan serupa agar industri tekstil tetap bertahan.

Pemerintah harus segera menerapkan langkah strategis untuk mengatasi krisis ini. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah penerapan kembali kebijakan safeguard guna membatasi impor tekstil yang tidak terkendali. Selain itu, industri tekstil lokal harus diberikan insentif berupa subsidi energi dan akses pembiayaan yang lebih murah agar tetap kompetitif.

Inovasi dan peningkatan efisiensi produksi juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Pemanfaatan teknologi modern dan pengembangan produk bernilai tambah harus didorong agar industri tekstil Indonesia dapat bersaing di pasar global. Selain itu, kampanye nasional untuk meningkatkan konsumsi produk dalam negeri perlu diperkuat agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendukung industri lokal semakin meningkat.

Penegakan hukum terhadap praktik impor ilegal juga harus diperketat. Jika tidak ada pengawasan yang ketat, arus barang impor ilegal akan terus menghancurkan pasar tekstil dalam negeri. Aparat penegak hukum dan lembaga terkait harus bekerja lebih keras untuk memastikan praktik perdagangan yang merugikan industri lokal dapat diminimalisir.

Krisis yang terjadi di industri tekstil bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi juga peringatan` bagi semua pihak bahwa ada ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi yang perlu segera diperbaiki. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat,

Indonesia berpotensi kehilangan salah satu sektor yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Keputusan untuk bertindak atau tidak ada di tangan seluruh komponen bangsa ini. Saatnya mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan industri tekstil nasional sebelum terlambat.

CKP Textile Tetap Optimis di Tengah Gempuran Tekstil Impor

Industri tekstil Indonesia menghadapi tantangan besar akibat persaingan dengan produk kain impor yang lebih murah. Perubahan ini memaksa banyak perusahaan lokal untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi, kenaikan biaya produksi, dan persaingan ketat dari kain impor seperti cotton combed yang ditawarkan dengan harga lebih rendah oleh produsen asing.



Perusahaan tekstil asing umumnya mengandalkan strategi harga agresif dengan dukungan subsidi besar dari pemerintah mereka. Hal ini memungkinkan mereka menawarkan berbagai jenis kain dengan harga yang sangat kompetitif, sering kali lebih rendah dari biaya produksi yang ditanggung oleh perusahaan lokal. Beberapa di antaranya bahkan menerapkan strategi penetapan harga yang menekan pasar dan menyulitkan produsen dalam negeri untuk bersaing.

Namun, di tengah kondisi ini, CKP Textile tetap menunjukkan ketangguhannya sebagai salah satu pemain besar di industri tekstil lokal. Faktor utama yang membuat CKP Textile bertahan dan berkembang adalah komitmennya terhadap standar kualitas dengan menghadirkan kain cotton combed terbaik.

Alih-alih terjebak dalam perang harga, CKP Textile melihat peluang untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Keberhasilannya terletak pada tiga aspek utama: kualitas tinggi, efisiensi produksi, serta strategi bisnis yang adaptif dan inovatif. CKP Textile menghadirkan produk premium dengan teknologi mutakhir seperti anti-UV, antibakteri, dan quick dry, menjadikannya pilihan utama bagi industri fashion lokal, mulai dari garment, konveksi, hingga toko kain yang mengutamakan kualitas.

Untuk mempertahankan daya saing, CKP Textile terus mengoptimalkan proses produksi agar lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas. Perusahaan menerapkan sistem produksi yang lebih terukur untuk menekan biaya produksi sekaligus menjaga standar kain tetap tinggi. Selain itu, CKP Textile memperkuat jaringan distribusinya dengan memasok kain ke berbagai mitra serta memiliki toko kain sendiri di Bandung, yang memungkinkan pelanggan melihat dan merasakan langsung kualitas kain sebelum melakukan pembelian dalam jumlah besar.

Dalam menghadapi perubahan pola konsumsi, CKP Textile juga mengadopsi strategi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan memanfaatkan media sosial dan e-commerce, perusahaan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan serta membangun hubungan jangka panjang melalui edukasi dan interaksi aktif di berbagai platform digital. Banyak pelaku bisnis fashion memilih kain cotton combed

dari CKP Textile tidak hanya karena kualitasnya unggul, tetapi juga karena mereka mendapatkan edukasi tentang cara merawat dan mengolah kain dengan benar.

Dengan mengutamakan kualitas premium, efisiensi produksi, dan inovasi digital, CKP Textile menawarkan solusi bagi industri fashion lokal agar tetap kompetitif. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa industri tekstil dalam negeri masih memiliki peluang besar untuk berkembang di tengah persaingan global.



Pemerintah Perkuat Kebijakan untuk Redam PHK di Industri Tekstil

Pemerintah terus berupaya menciptakan hubungan industrial yang kondusif guna mencegah lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri, khususnya industri tekstil dan produk tekstil yang tengah menghadapi perlambatan ekonomi.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menyatakan bahwa kebijakan ketenagakerjaan menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. PHK di industri tekstil terjadi akibat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, banyak pabrik masih menggunakan mesin yang telah berusia lebih dari 20 tahun, sehingga produktivitas dan daya saing produk

menurun. Sementara dari sisi eksternal, persaingan dengan produk impor yang lebih murah, maraknya impor ilegal, serta tren pembelian pakaian bekas atau thrifting memperburuk kondisi industri.

Di awal tahun 2025, mayoritas PHK terjadi karena kebangkrutan perusahaan dengan total 13.204 kasus, sementara beban upah yang tinggi menyebabkan 4.461 kasus PHK. Selain itu, beberapa kasus PHK juga terjadi akibat relokasi pabrik ke daerah atau negara lain yang lebih kompetitif.

Untuk mengatasi dampak PHK, pemerintah berkomitmen memperkuat keahlian mediasi perselisihan hubungan industrial, meningkatkan kapasitas mediator, serta mensosialisasikan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Seluruh langkah ini bertujuan untuk mencegah PHK dan memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi jika PHK tidak dapat dihindari.

Selain itu, pemerintah juga berfokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan vokasi yang tersedia dalam sistem informasi pasar kerja SIAPKerja Kementerian Ketenagakerjaan. Melalui platform ini, pekerja yang terdampak PHK dapat mengakses pelatihan, informasi lowongan kerja, serta konsultasi karir yang didukung oleh Dinas Tenaga Kerja di berbagai daerah.

Sebagai langkah lebih lanjut, pemerintah berupaya menarik lebih banyak investor dengan menyederhanakan sistem perizinan guna meningkatkan investasi padat karya di sektor tekstil. Investasi baru sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak PHK serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Dengan berbagai kebijakan yang diterapkan, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih stabil

dan mencegah gelombang PHK massal di masa mendatang.

Indonesia Tampilkan Kain Berkualitas di Intertextile Shanghai 2025



Konjen RI Shanghai, Berlianto Situngkir, bersama ITPC Shanghai menghadiri pameran Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – Spring Edition yang berlangsung di Shanghai pada 11 Maret 2025. Pameran ini bertema “An Eminent Textile and Fabric Exhibition” dan merupakan ajang internasional yang diselenggarakan oleh Messe Frankfurt Hongkong di National Convention and Exhibition Center (NECC), Shanghai.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah (Roy) Soemirat, menjelaskan bahwa pameran ini diikuti oleh 3.100 eksibitor dari 24 negara, termasuk Hongkong, Jepang, Korea, Taiwan, dan Italia. Kehadiran Indonesia dalam acara ini menegaskan peran industri tekstil nasional dalam persaingan pasar global.

Dalam kesempatan tersebut, Konjen RI dan ITPC Shanghai mengunjungi beberapa perusahaan Indonesia yang turut berpartisipasi, di antaranya PT Asia Pacific Rayon dan PT Embee Plumbon Textile. Kedua perusahaan tersebut mempromosikan berbagai produk unggulan seperti Rayon Yarn, Lyocell Yarn, Viscose Yarn, dan Cotton Yarn.

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics dikenal sebagai salah satu pameran pakaian dan aksesoris terbesar serta terlengkap di dunia untuk berbagai musim. Keikutsertaan perusahaan-perusahaan Indonesia di pameran ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan penetrasi ke pasar Tiongkok dan global, serta memperkuat posisi industri tekstil Indonesia di kancah internasional.

Pesanan AS Meningkat, Ekspor Tekstil Indonesia Tembus US\$1,02 Miliar

Ekspor tekstil Indonesia mencatat kenaikan signifikan, mencapai US\$1,02 miliar per Februari 2025 atau naik 1,41 persen dibanding bulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa lonjakan ini didorong oleh meningkatnya pesanan dari Amerika Serikat, yang menjadi salah satu pasar utama tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia.



Kepala BPS, Amalia Adininggar Widhyasanti, menjelaskan bahwa salah satu komoditas utama yang berkontribusi terhadap kenaikan ekspor adalah pakaian dan aksesorinya berbasis rajutan (HS 61). Produk ini masuk dalam tiga besar komoditas ekspor Indonesia ke AS, dengan peningkatan nilai ekspor TPT ke negara tersebut sebesar US\$17,4 juta atau naik 4,13 persen dibanding Januari 2025.

Di sisi lain, impor tekstil mengalami penurunan yang cukup tajam. Secara keseluruhan, impor TPT turun 20,74 persen secara month-to-month (mtm), dengan nilai impor mencapai US\$606,8 juta. Salah satu faktor utama penurunan ini adalah

berkurangnya impor dari China, yang anjlok sebesar US\$141,1 juta atau 36,60 persen dibanding bulan sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyoroti tren positif di industri tekstil nasional. Ia menyebut sektor ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,3 persen sepanjang 2024, berbanding terbalik dengan penurunan 2 persen yang terjadi pada 2023. Bahkan, di awal 2025, ekspor TPT tetap mencatat pertumbuhan positif sebesar 3,8 persen.

Sri Mulyani menekankan bahwa kinerja industri manufaktur, termasuk sektor tekstil, menunjukkan ketahanan yang kuat meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Ia menambahkan bahwa industri berbasis tenaga kerja seperti tekstil, alas kaki, serta sektor logam dasar dan elektronik tetap mampu tumbuh, menjadi landasan optimisme bagi perekonomian nasional.

Dengan tren ekspor yang terus meningkat serta penurunan impor yang signifikan, industri tekstil Indonesia memiliki peluang besar untuk semakin berkembang dan memperkuat daya saingnya di pasar global.



Tantangan Batik Cirebon di Tengah Gempuran Produk Tekstil Murah

Industri batik di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengalami pertumbuhan pada 2024,

meskipun peningkatannya tergolong kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai produksi batik Cirebon meningkat dari Rp87,4 miliar pada 2023 menjadi Rp88,3 miliar pada 2024, dengan kapasitas produksi bertambah dari 42.611 kodi menjadi 42.782 kodi. Meskipun demikian, pertumbuhan ini belum cukup signifikan untuk dikategorikan sebagai perkembangan yang kuat.

Salah satu kendala utama yang dihadapi industri batik Cirebon adalah stagnasi jumlah perusahaan yang tetap di angka 597 unit, serta pertumbuhan tenaga kerja yang hanya bertambah 10 orang, dari 4.707 pekerja pada 2023 menjadi 4.717 pekerja pada 2024. Selain itu, daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih setelah pandemi turut mempengaruhi permintaan batik, terutama dari luar daerah. Banyak konsumen yang masih menahan belanja, terutama untuk batik berkualitas tinggi.



Faktor lain yang menjadi tantangan adalah meningkatnya harga bahan baku seperti kain mori dan pewarna alami, yang menyebabkan biaya produksi melonjak. Para pengrajin pun terpaksa menaikkan harga jual, yang pada akhirnya berdampak pada daya saing produk mereka. Untuk mengatasi hal ini, beberapa pengusaha batik mulai memanfaatkan teknologi digital dengan menjual produk mereka secara daring melalui media sosial dan marketplace guna menjangkau pasar yang lebih luas.

Selain tantangan dari segi produksi dan pemasaran, industri batik Cirebon juga harus bersaing dengan masuknya produk tekstil bermotif batik yang diproduksi secara massal dengan teknik cetak mesin. Produk ini dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan batik tulis atau batik cap asli Cirebon yang memerlukan proses pembuatan manual dan waktu lebih lama. Akibatnya, banyak konsumen yang beralih ke produk tersebut tanpa menyadari perbedaan kualitas dan keaslian motif.

Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pengrajin Batik Indonesia, Komarudin Kudiya, mengungkapkan bahwa banyaknya produk tekstil bermotif batik yang beredar di pasaran menjadi ancaman bagi keberlangsungan batik tradisional Cirebon. Ia menegaskan bahwa motif khas seperti Mega Mendung memiliki keunikan tersendiri yang tidak dapat ditemukan pada batik hasil cetak. Meskipun demikian, Komarudin tetap optimistis bahwa batik Cirebon memiliki pasar tersendiri dan akan tetap bertahan di tengah persaingan dengan produk tekstil murah. Dengan inovasi dan strategi pemasaran yang lebih baik, diharapkan batik Cirebon dapat terus berkembang dan mempertahankan eksistensinya sebagai warisan budaya Indonesia.

DPR Dorong Pembentukan Satgas Padat Karya untuk Selamatkan Industri Tekstil

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Padat Karya. Menurutnya, langkah ini merupakan strategi penting dalam melindungi sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) dari ancaman dumping produk impor yang semakin marak.

Chusnunia menegaskan bahwa industri TPT memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia dengan menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 2 miliar dolar AS dalam ekspor per tahun. Namun, industri ini sedang menghadapi tantangan besar akibat persaingan global yang ketat dan praktik perdagangan yang tidak adil.



“Industri tekstil sangat penting bagi perekonomian Indonesia, dengan menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap ekspor. Jika kita tidak mengambil langkah tegas, ancaman PHK massal dan melemahnya rantai pasok bisa terjadi,” ungkap Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Sebagai Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif DPP PKB, Chusnunia juga menyoroti perlunya pemberian insentif bagi industri tekstil lokal agar tetap kompetitif. Menurutnya, stimulus dalam bentuk keringanan pajak, subsidi energi, dan akses pembiayaan yang lebih mudah sangat diperlukan untuk mendukung pelaku usaha dalam negeri menghadapi tantangan global.

“Untuk menjaga daya saing industri tekstil nasional, pemerintah perlu memberikan dukungan nyata. Insentif fiskal dan kemudahan pembiayaan akan sangat membantu pelaku usaha dalam menghadapi tantangan berat ini,” tambahnya.

Di samping itu, Chusnunia menekankan pentingnya keseimbangan antara

percepatan perizinan dengan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, penyederhanaan birokrasi tidak boleh mengorbankan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

“Proses perizinan memang perlu dipermudah, tetapi tidak boleh mengorbankan aspek keberlanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan,” tegasnya.

Ia juga menyarankan agar Satgas yang akan dibentuk dapat bekerja secara sinergis dengan kementerian terkait, asosiasi industri, dan pelaku usaha. Keberhasilan Satgas, menurutnya, tidak hanya bergantung pada regulasi yang dihasilkan tetapi juga koordinasi yang efektif antara sektor publik dan swasta.

“Satgas ini harus berfungsi sebagai garda terdepan yang merumuskan kebijakan konkret dan berorientasi pada solusi. Keberhasilan Satgas sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja untuk memastikan dampak positif yang nyata,” ujar Chusnunia.

Ia berharap pemerintah segera merealisasikan pembentukan Satgas serta kebijakan terkait guna memastikan keberlanjutan dan daya saing industri padat karya, khususnya sektor tekstil. Menurutnya, kebijakan yang tepat akan memungkinkan industri tekstil Indonesia tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Strategi Pemerintah Genjot Industri Tekstil Melalui EU-CEPA dan Revitalisasi Mesin



Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempercepat penyelesaian kesepakatan perdagangan European Union-Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA). Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing serta memperluas peluang ekspor bagi industri tekstil nasional.

"Pasar terbesar untuk tekstil dan produk tekstil Indonesia adalah Uni Eropa. Pasar ini menyumbang hampir 30 persen dari permintaan global, sedangkan Amerika hanya sekitar 15 persen," ujar Airlangga di Istana, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

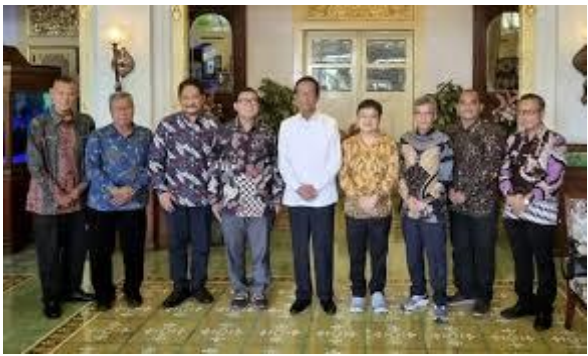
Dengan permintaan yang besar dari Uni Eropa, Airlangga menegaskan bahwa percepatan penyelesaian EU-CEPA menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan industri tekstil Indonesia. Ia mencontohkan Vietnam yang telah menjalin kemitraan komprehensif dengan Uni Eropa dan berhasil meningkatkan ekspor tekstilnya hingga 50 persen. Oleh karena itu, ia menilai penyelesaian perjanjian ini harus segera dilakukan untuk memberikan manfaat serupa bagi industri dalam negeri.

Selain upaya membuka akses pasar yang lebih luas, pemerintah juga telah menyiapkan paket revitalisasi permesinan guna meningkatkan daya saing industri tekstil. Regulasi terkait revitalisasi ini akan segera dirilis, dengan dukungan subsidi investasi sebesar Rp20 triliun. Airlangga menekankan bahwa tanpa modernisasi mesin, industri tekstil Indonesia akan

kesulitan bersaing, baik dari segi efisiensi energi maupun kecepatan produksi.

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, pemerintah juga akan menyediakan kredit investasi bagi sektor-sektor padat karya, termasuk industri tekstil, sepatu, makanan dan minuman, serta furniture. Kredit ini akan diberikan dengan subsidi bunga sebesar 5 persen dan tenor selama 8 tahun. Diharapkan, kebijakan ini dapat membantu industri tekstil kembali bangkit dan memperkuat posisinya di pasar global.

Yogyakarta Siap Menjadi Tuan Rumah Konferensi Tekstil dan Apparel Internasional 2025



Kota Yogyakarta resmi ditunjuk sebagai tuan rumah “ITMF Annual Conference & IAF World Fashion Convention 2025” yang akan berlangsung pada 24-25 Oktober 2025. Konferensi internasional ini mengusung tema “Navigating Uncertainty & Adopting Technology-Pathways to Sustainable Strength in the Textile & Apparel Industry” dan akan dihadiri oleh 350 peserta dari berbagai negara.

Sebagai bagian dari persiapan, jajaran pengurus Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang juga menjadi panitia konferensi nasional mengadakan audiensi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kepatihan Yogyakarta pada 21 Maret 2025. Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua Umum API

Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, Direktur Eksekutif API Danang Girindwardana, serta pengurus API DIY, termasuk Ketua Umum API DIY Suyatman Nainggolan dan Penasehat API DIY Robby Kusumaharta.

Sri Sultan HB X menyambut baik pelaksanaan acara ini, dengan mempertimbangkan keunggulan Yogyakarta sebagai Kota Batik dengan warisan budaya yang kuat, perkembangan industri tekstil dan produk lokal yang pesat, serta ketersediaan fasilitas yang memadai untuk konferensi internasional. Ia juga berharap agar perhelatan ini dapat menjadi langkah awal menuju reindustrialisasi di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global yang tengah dihadapi industri manufaktur, khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Di tengah kondisi industri TPT yang menghadapi persaingan ketat dan banyaknya perusahaan nasional yang mengalami kebangkrutan akibat regulasi yang kurang mendukung produk domestik, Sri Sultan HB X menekankan pentingnya perbaikan kebijakan. Deregulasi dan debirokratisasi dalam perdagangan internasional diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif serta memberikan proteksi terhadap produk tekstil dalam negeri.

Selain konferensi utama, Yogyakarta juga akan menjadi tuan rumah bagi pertemuan regional Asosiasi Pertekstilan se-ASEAN (AFTEX) yang dijadwalkan pada 23-27 Oktober 2025. Acara ini akan dihadiri oleh 30 delegasi dari sembilan negara ASEAN, dengan harapan dapat membangkitkan kembali industri tekstil, terutama bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Selain agenda konferensi dan diskusi bisnis, peserta juga akan mengikuti berbagai kegiatan tambahan, termasuk kunjungan

perusahaan serta wisata ke Candi Prambanan dan Borobudur pada 22, 26, dan 27 Oktober 2025. Dengan rangkaian acara ini, konferensi internasional yang digelar di Yogyakarta diharapkan mampu memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi sektor industri tekstil, tetapi juga bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di DIY.

Investasi di Industri Tekstil Indonesia: Antara Harapan dan Realita

Minat investor asing untuk mengembangkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia masih tergolong rendah. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai hal ini disebabkan oleh kondisi pasar yang belum stabil serta regulasi yang kurang mendukung. Wakil Ketua API, David Leonardi, menjelaskan bahwa investasi hanya akan efektif jika didukung oleh daya beli dan permintaan pasar yang kuat agar dapat memberikan dampak positif bagi industri dan negara. Namun, ia menyoroti bahwa saat ini kondisi pasar domestik dan global masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi industri TPT nasional adalah kebijakan relaksasi impor yang tidak diimbangi dengan perlindungan pasar dalam negeri. Kebijakan ini memungkinkan masuknya produk jadi dalam jumlah besar ke pasar domestik, sehingga menyebabkan penurunan pesanan bagi industri dan pelaku usaha kecil menengah (IKM). Bahkan, pada periode Lebaran yang biasanya menjadi momentum peningkatan permintaan, industri tekstil tidak mengalami lonjakan pesanan yang signifikan.

Pemerintah berencana memberikan insentif revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas industri padat karya. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan menyediakan

subsidi kredit investasi sebesar 5% bagi industri skala kecil dan menengah, termasuk sektor tekstil dan produk tekstil. Untuk mendukung kebijakan ini, anggaran sebesar Rp20 triliun telah disiapkan. Namun, David mengungkapkan kekhawatirannya bahwa insentif ini tidak akan berdampak maksimal apabila kondisi pasar belum membaik dan regulasi yang jelas belum diterapkan. Menurutnya, tanpa adanya kebijakan yang tegas, investor akan tetap enggan menanamkan modalnya di Indonesia.

Sementara itu, data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan adanya peningkatan realisasi investasi di sektor tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki. Pada tahun 2024, nilai investasi sektor ini mencapai Rp39,21 triliun, naik 31,1% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp29,92 triliun. Investasi di industri pakaian jadi bahkan mengalami lonjakan hingga 124,9%, dari Rp4,53 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp10,20 triliun pada tahun 2024. Selain itu, pada kuartal I tahun 2025, terdapat empat industri tekstil dan pakaian jadi yang mendapatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dengan total investasi sebesar Rp304,43 miliar dan diperkirakan mampu menyerap 1.907 tenaga kerja.

Meskipun data tersebut menunjukkan peningkatan investasi, kondisi di lapangan masih memperlihatkan tantangan besar. Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, menyampaikan bahwa banyak perusahaan tekstil yang terpaksa tutup akibat membanjirnya impor ilegal yang tidak dikendalikan secara ketat oleh pemerintah. Ia mencatat bahwa pada tahun 2024, sekitar 60 perusahaan di sektor hilir dan tengah industri tekstil telah berhenti beroperasi, yang mengakibatkan sekitar 250.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, industri tekstil dan produk tekstil saat ini tengah menghadapi

ancaman deindustrialisasi yang telah berlangsung selama satu dekade terakhir.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, API mendorong pemerintah untuk lebih fokus dalam memperbaiki regulasi yang dapat memberikan perlindungan optimal bagi industri tekstil nasional. Perlindungan tersebut tidak hanya penting untuk menjaga rantai pasok industri, tetapi juga dalam menciptakan dampak positif bagi perekonomian, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. Jika kebijakan yang mendukung industri tekstil tidak segera diterapkan, maka investasi yang telah masuk pun berisiko tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi pertumbuhan sektor ini di Indonesia.

Birokrasi Berbelit Jadi Penghambat Relokasi Pabrik Tekstil ke Indonesia



Rencana relokasi pabrik dan investasi sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) dari China ke Indonesia mengalami kendala besar akibat permasalahan birokrasi. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mengungkapkan bahwa birokrasi yang rumit dan tidak transparan menjadi hambatan utama dalam menarik investasi asing di sektor ini. Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, menyebutkan bahwa potensi investasi dari China ke Indonesia sebenarnya sangat besar, terutama akibat perang tarif antara China dan Amerika Serikat. Namun, proses perizinan yang berbelit serta adanya oknum

birokrasi yang bermain dalam pengurusan izin membuat investasi ini mandek.

Indonesia dipandang sebagai negara potensial untuk relokasi industri tekstil dari China, mengingat kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk asal China. Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan adanya peningkatan realisasi investasi di sektor tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki. Pada tahun 2024, nilai investasi sektor ini mencapai Rp39,21 triliun, meningkat 31,1% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp29,92 triliun. Investasi di industri pakaian jadi bahkan melonjak 124,9%, dari Rp4,53 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp10,20 triliun pada tahun 2024. Selain itu, pada kuartal I tahun 2025, terdapat empat industri tekstil dan pakaian jadi yang mendapatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dengan total investasi sebesar Rp304,43 miliar, yang diperkirakan mampu menyerap 1.907 tenaga kerja.

Meski angka investasi menunjukkan tren positif, Redma menyoroti bahwa keberlanjutan investasi di sektor ini bergantung pada langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki birokrasi. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan reformasi besar dalam sistem perizinan agar tidak hanya sekadar menciptakan program yang terlihat mentereng tetapi minim dampak nyata bagi industri. Jika hambatan birokrasi ini terus berlanjut, maka potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam menarik investasi tekstil dari China bisa saja terbuang sia-sia.

Pemerintah sendiri telah menyatakan komitmennya untuk melakukan deregulasi perizinan di sektor TPT guna meningkatkan daya saing industri dan menarik lebih banyak investor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa industri tekstil dan

produk tekstil memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Sektor ini berkontribusi terhadap ekspor lebih dari US\$2 miliar dan menyerap hampir 4 juta tenaga kerja. Dengan meningkatnya produksi barang bernilai tambah tinggi seperti sepatu dan tekstil, Indonesia sebenarnya sudah naik kelas dalam industri manufaktur global.

Namun, agar dapat benar-benar menarik lebih banyak investasi, masih dibutuhkan perbaikan mendasar dalam regulasi dan perizinan. Airlangga menekankan pentingnya penyederhanaan proses perizinan agar investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya di sektor tekstil dan produk tekstil. Jika langkah ini dapat direalisasikan dengan baik, Indonesia berpeluang besar menjadi pusat industri tekstil yang lebih kompetitif di pasar global.

Dukungan Pemerintah untuk UMKM Tekstil Lewat KUR Rp 20 Triliun



Pemerintah mengalokasikan Rp 20 triliun dari total target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 sebesar Rp 300 triliun untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor tekstil. Dana tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha dalam membeli peralatan baru guna meningkatkan daya saing industri tekstil nasional.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa alokasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur dan peralatan

industri tekstil. Menurutnya, sektor ini menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu mendapat perhatian lebih dalam kebijakan pendanaan. Sebelumnya, KUR lebih banyak dialokasikan untuk sektor pertanian dan perikanan, namun kini pemerintah berupaya memperkuat sektor tekstil yang dinilai memiliki potensi besar dalam perekonomian nasional.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun melalui skema kredit investasi padat karya. Kredit ini ditujukan untuk sektor industri seperti tekstil, produk tekstil, sepatu, makanan dan minuman, furniture, serta kulit.

Dengan tenor delapan tahun, kredit investasi ini juga mendapat subsidi bunga sebesar 5 persen dari pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri tekstil Indonesia, terutama dalam hal efisiensi energi dan kecepatan produksi. Pemerintah optimis bahwa kebijakan ini akan membantu UMKM tekstil dalam menghadapi tantangan industri serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.

Krisis Daya Beli dan Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025



Menjelang Lebaran 2025, konsumsi masyarakat menunjukkan pola yang tidak biasa. Tidak ada lonjakan belanja seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan beberapa

indikator ekonomi seperti deflasi awal tahun, penurunan penjualan riil, dan melemahnya transaksi menggunakan kartu debit serta kredit menegaskan adanya anomali konsumsi di tengah masyarakat.

Laporan dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyebutkan bahwa lemahnya konsumsi rumah tangga ini disebabkan oleh tekanan terhadap pendapatan kelompok menengah dan menengah ke bawah. Faktor utama yang berkontribusi adalah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur yang berujung pada penurunan daya beli.

PHK massal di industri tekstil menjadi salah satu pemicu utama. Kasus PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang merumahkan lebih dari 10.000 pekerja pada Februari 2025 hanyalah permulaan. Data CORE menunjukkan bahwa sejak 2022, sebanyak 60 industri tekstil padat karya telah melakukan PHK, mengakibatkan sekitar 227 ribu pekerja kehilangan pekerjaan. Kondisi ini diperburuk dengan catatan Kementerian Ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa hanya dalam bulan Januari 2025, terdapat 3.325 pekerja yang terkena PHK, dengan Jakarta menjadi wilayah terdampak terbesar.

Selain meningkatnya angka PHK, CORE juga mencatat bahwa melambatnya pertumbuhan upah riil semakin memperburuk daya beli masyarakat. Upah riil di sektor manufaktur mengalami kontraksi sebesar 0,7% pada 2024, padahal pada tahun-tahun sebelumnya masih mencatat pertumbuhan rata-rata 5,6%. Kondisi serupa terjadi di sektor pertanian yang mencatat penurunan 0,6%, serta sektor penyedia akomodasi dan makanan minuman yang turun 1,4%. Bahkan sektor perdagangan, meskipun tidak berkontraksi, mengalami perlambatan signifikan dari pertumbuhan 10% pada 2022 menjadi hanya 0,1% pada 2024.

Kombinasi antara meningkatnya angka PHK dan stagnasi pertumbuhan upah riil menjadikan kelompok rumah tangga kelas menengah dan menengah ke bawah semakin terhimpit. Konsumsi yang biasanya meningkat menjelang Lebaran kini mengalami perlambatan, menandai dampak nyata dari krisis daya beli yang tengah melanda. Tanpa solusi yang konkret, situasi ini bisa menjadi tantangan serius bagi perekonomian ke depan.